

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat positif dalam dunia nyata (*riil*), amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun sangat berbeda. Misalnya, produksi singkong diukur dengan satuan berat (kilogram atau ton), sementara produk air bersih atau air minum diukur dalam satuan volume, minyak bumi dengan satuan barel. Belum lagi produk-produk yang tidak diukur dengan satuan fisik, misalnya jasa konsultasi, jasa pariwisata dan jasa-jasa modern lainnya.

Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan *output* adalah nilai moneterinya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang disebabkan oleh barang dan jasa yang

---

<sup>1</sup> Ali Musa Pasaribu, *Konsep Blue Economy* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), 79.

<sup>2</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi," *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7, no. 1, (2018): 1-2, diakses pada 28 Desember 2018.

diproduksi dalam masyarakat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi keinginan dan tujuan bagi setiap Negara maupun daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu Negara mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu maka perekonomian suatu Negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan atau bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, karena pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menyeimbangkan kondisi perekonomian suatu Negara. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang terkait dengan percepatan pengembangan sektor riil. Kebijakan sektor riil ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor riil atau disebut juga *real sector*, adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Sektor riil tersebut meliputi: industri pengolahan, pertanian, pertambangan, perdagangan, hotel dan restoran, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak Negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ina Sholihati Cahyaningrum, "Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014," *Jurnal An-Nisbah* 04, no. 01 (2017): 107, diakses pada 28 Desember 2018.

<sup>4</sup> Ina Sholihati Cahyaningrum, Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah, 108.

<sup>5</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 2.

Pertumbuhan ekonomi dapat menerangkan dan sekaligus mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu Negara di samping indikator-indikator lain seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil diharapkan akan memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi yang lebih besar. Satu fakta yang tak terbantahkan, pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : *pertama*, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat dunia, *kedua*, terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.

Meskipun demikian, ditengah pesatnya perkembangan dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. Sedangkan di Negara berkembang, kondisinya lebih parah lagi. Sampai saat ini, kesenjangan pendapatan, pengangguran, kekurangan pangan dan beragam kesengsaraan hidup masih mewarnai sebagian besar penduduk dunia. Dan kondisi ini diperparah lagi dengan terjadinya krisis keuangan global yang memperburuk kondisi ekonomi di berbagai negara.

Terjadinya krisis ekonomi dalam persepektif Islam tentu saja tidak terlepas dari praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perilaku riba (dalam makna yang luas), monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntunan ekonomi Ilahiah, maka tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya akibat ulah tangan manusia sendiri.

Hal ini seperti disinyalir Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 40: "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada*

---

<sup>6</sup> Novegya Ratih Primandari, "Pengaruh Nilai Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 2000-2015," *Jurnal Kolegial* 3, no. 2, (2017): 183, diakses pada 28 Desember 2018.

*mareka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".*

Krisis ekonomi – dalam analisis Chapra – telah memperlihatkan secara jelas kelemahan logika Hukum Say dan konsep *laissez faire*. Ini dibuktikan oleh ekonomi pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat *full employment* dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang semakin tajam, model-model matematika dan ekonometri yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap memiliki keterbatasan untuk menggambarkan, menganalisa maupun memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif waktu jangka pendek.

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Dalam konteks ini, Keynes pernah mengatakan, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkat teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”.

Melihat fakta di atas, jelas bahwa sistem ekonomi konvensional hari ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.

Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua Negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisasi atau bahkan menghilangkan segala *negative effect* pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan tanpa melupakan aspek moral.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, No. 2, (2018): 118-119, diakses pada 23 Oktober 2019.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, investasi, angkatan kerja yang bekerja, dan *human capital investment*. Aglomerasi atau pola pemusatan yang artinya terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk berusia 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja dan yang sedang mencari kerja atau kegiatan lain. *Human capital investment* adalah pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja orang tersebut juga.<sup>8</sup>

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya dijadikan sebagai tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh setiap wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kudus.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Eko Wicaksono Pembudi dan Miyasto, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal of Economics* 2, no. 2, (2013): 1-2, diakses pada 16 Januari 2019.

<sup>9</sup> Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2, (2014): 3, diakses pada 4 Januari 2019.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus**  
**atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2007-2017**

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2007	333,00
2.	2008	392,00
3.	2009	395,00
4.	2010	417,00
5.	2011	424,00
6.	2012	411,00
7.	2013	436,00
8.	2014	443,00
9.	2015	388,00
10.	2016	252,00
11.	2017	297,00

Sumber : BPS Jawa Tengah dalam angka beberapa edisi (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus selama 11 tahun dari tahun 2007-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,43%. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 2,97%.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tentang hak-hak buruh sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berkaitan dengan hal diatas maka tenaga kerja atau buruh yang bekerja dalam perusahaan sering diekplotasi dalam proses produktivitas perusahaan, dimana buruh sering menerima upah dibawah harga pasar dan hak-hak sebagai seorang buruh tidak

dipenuhi seperti hak untuk keselamatan dalam bekerja, tunjangan kesehatan, cuti dan lain-lain.

Islam mengajarkan dalam menegakan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia secara menyeluruh. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang. Melalui ajaran moral ini Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Islam tidak mengakui adanya eksploitasi dalam dunia kerja, justru menganjurkan memberikan pertolongan dan bantuan bagi karyawan ketika menjalankan pekerjaan.<sup>10</sup>

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber panghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan kepuasan kerja. Sedangkan bagi pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang di lain pihak untuk mendorong kemampuan dan daya saing usaha.<sup>11</sup>

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa Negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum* 10, No. 2, (2010): 310, diakses pada 23 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Armansyah Walian, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis* 5, no. 2, (2017): 266, diakses pada 29 Januari 2019.

<sup>12</sup> Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia," *Jurnal Eksos* 8, no. 3, (2012): 197, diakses pada 29 Januari 2019.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK)**  
**di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2017 (Rupiah)**

No.	Tahun	UMK
1.	2007	650000,00
2.	2008	672500,00
3.	2009	750694,00
4.	2010	775000,00
5.	2011	840000,00
6.	2012	889000,00
7.	2013	990000,00
8.	2014	1150000,00
9.	2015	1380000,00
10.	2016	1608200,00
11.	2017	1740900,00

Sumber: BPS Jawa Tengah dalam angka

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2017 tingkat upah minimum Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015, dari 1.150.000 rupiah di tahun 2014 menjadi 1.380.000 rupiah di tahun 2015.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.<sup>13</sup>

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan, sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 129.

perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.<sup>14</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, terutama Negara sedang berkembang. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.<sup>15</sup>

Kemiskinan sudah dikenal dan menjadi masalah sejak beberapa abad yang silam. Upaya-upaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut juga sudah banyak dilakukan yaitu mulai dari penyebarluasan pesan-pesan moral kepada kelompok kaya, pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang atau modal, peningkatan pendidikan dan latihan, maupun pembinaan kepada masyarakat miskin. Akan tetapi upaya-upaya itu belum dapat mendatangkan hasil yang optimal.<sup>16</sup>

Kemiskinan selama ini lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan juga berkaitan dengan berbagai dimensi antara lain: dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.

---

<sup>14</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*, 2.

<sup>15</sup> Moh. Arif Novriansyah, "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo," *Jurnal Gorontalo Development Review* 1, no. 1, (2018): 60-61, diakses pada 09 Januari 2019.

<sup>16</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 113.

Sehingga program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan (konsisten).<sup>17</sup>

Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri.<sup>18</sup>

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.<sup>19</sup>

Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.<sup>20</sup>

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah,

---

<sup>17</sup> Nurul Fadlillah, dkk., "Analisis Pengaruh Pendapat Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013," *Jurnal Eko-Regional* 11, no. 1, (2016): 18, diakses pada 16 Januari 2019.

<sup>18</sup> Moh. Arif Novriansyah, Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan, 61.

<sup>19</sup> Sudirman dan Lili Andriani, "Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi," *Jurnal of Economics and Business* 1, no. 1, (2017): 149, diakses pada 04 Januari 2019.

<sup>20</sup> Moh. Arif Novriansyah, Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan, 61.

buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksetaraan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.<sup>21</sup> Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.<sup>22</sup>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2007-2017**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Rupiah)
1.	2007	8240,00
2.	2008	9780,00
3.	2009	8486,00
4.	2010	7020,00
5.	2011	7359,00
6.	2012	6933,00
7.	2013	7008,00
8.	2014	6580,00
9.	2015	6410,00
10.	2016	6419,00
11.	2017	6445,00

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2007 sampai tahun 2017 mengalami naik turun. Jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun

<sup>21</sup> Syahrur Romi dan Etik Umiyati, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 2.

<sup>22</sup> Kuswanto dan Indah Giyanti Permata Dewi, "Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 1, (2016): 19, diakses pada 04 Januari 2019.

2008 yaitu sebesar 9.780. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil di Kabupaten Kudus yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah 6.410.

Dengan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus antara lain pertumbuhan ekonomi dan upah minimum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2017.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten Kudus tahun 2007-2017?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten Kudus tahun 2007-2017?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten Kudus tahun 2007-2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (studi kasus pada tahun 2007-2017 di Kabupaten Kudus).
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan (studi kasus pada tahun 2007-2017 di Kabupaten Kudus).
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama terhadap kemiskinan (studi kasus pada tahun 2007-2017 di Kabupaten Kudus).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya tentang pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan kemiskinan.
  - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang ekonomi mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan kemiskinan.
  - c. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Dengan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dalam penerapan ilmu yang dipelajari selama ini dan ilmu pengetahuan baru mengenai pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan.
  - b. Bagi Jurusan Syari'ah / EI IAIN Kudus  
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal  
Dalam bagian ini terdiri dari halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, surat pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian Isi  
Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**  
Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan Teori**  
Bab ini berisi tentang pertumbuhan ekonomi, upah minimum, kemiskinan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.
- Bab III : Metode Penelitian**  
Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan**  
Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan implikasi teori.
- Bab V : Penutup**  
Bab ini berisi tentang simpulan, saran-saran dan penutup.
3. Bagian Akhir  
Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.